



PIDATO
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (L K P J) WALIKOTA BINJAI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2016

ASSALAMUALLAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YANG SAYA HORMATI

- SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA BINJAI;
- SAUDARA WAKIL WALIKOTA BINJAI;
- SEGENAP FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA BINJAI;
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI;
- KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DAN;
- HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, MARILAH KITA SELALU MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA KITA DAPAT MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BINJAI YANG BERACARAKAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA DPRD KOTA BINJAI.

ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH, SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BINJAI YANG TELAH MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN SECARA OPTIMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN



PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2016. DEMIKIAN PULA KEPADA REKAN-REKAN FORUM PIMPINAN DAERAH, SEGENAP ULAMA, TOKOH MASYARAKAT SERTA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BINJAI.

PENYAMPAIAN LKPJ INI MERUPAKAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT. DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI DAN MENINGAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 TELAH BERAKHIR, SAYA SELAKU KEPALA DAERAH BERKEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI RAPAT PARIPURNA UNTUK MEMPRESENTASIKAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN YANG TELAH DICAPAI SELAMA TAHUN ANGGARAN 2016.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

LKPJ KOTA BINJAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 INI DISUSUN BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2011–2015, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2016,



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) SERTA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2016.

BERDASARKAN RPJMD KOTA BINJAI TAHUN 2011-2015, VISI PEMERINTAH KOTA BINJAI ADALAH

“TERWUJUDNYA KOTA BINJAI SEBAGAI KOTA IDAMAN YANG DINAMIS, BERDAYA SAING DAN NYAMAN DALAM KEBERSAMAAN”

UNTUK MEWUJUDKAN VISI INI, MISI YANG DIEMBAN OLEH PEMERINTAH KOTA BINJAI ADALAH :

1. MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN;
2. MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA;
3. MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;
4. MEMBANGUN DAN MEMBINA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA;
5. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBER-HASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 SERTA PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI PADA TAHUN 2016 TERUTAMA MENYANGKUT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KETERTINGGALAN, DITETAPKAN TEMA PEMBANGUNAN KOTA BINJAI TAHUN 2016, YAITU “MELANJUTKAN



PEMBANGUNAN MENUJU KOTA PUSAT PELAYANAN JASA, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BERBASIS ONLINE”

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA TIDAK HANYA MENGENAI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR TETAPI JUGA MENYANGKUT KESELURUHAN MASYARAKAT KOTA BINJAI. DENGAN BERBAGAI UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN, PEMERINTAH KOTA BINJAI TERUS BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK DAPAT MENCAPAI TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DI RPJMD TAHUN 2011-2015 MENGIKAT TAHUN 2016 MERUPAKAN TAHUN TRANSISI PERIODE RPJMD KOTA BINJAI DAN MERUPAKAN MOMEN YANG PENTING UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KOTA BINJAI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 MENGACU PADA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 PADA VISI ANTARA RPJPD TAHUN 2016-2020 YAITU “KOTA BINJAI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN JASA, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BERBASIS ONLINE DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMILIKI DAYA SAING YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

ADAPUN UPAYA YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM RANGKA TERCAPAINYA VISI TERSEBUT DIWUJUDKAN MELALUI MISI SEBAGAI BERIKUT :

1. MEWUJUDKAN DAYA SAING KOTA BINJAI DALAM PELAYANAN PERMUKIMAN, JASA, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT KOTA BINJAI YANG LEBIH MAKMUR DAN SEJAHTERA;
2. MEWUJUDKAN KOTA BINJAI SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN;



3. MEWUJUDKAN KOTA BINJAI YANG MEMILIKI GOOD GOVERNANCE, BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERLANDASKAN HUKUM;
4. MEWUJUDKAN KOTA BINJAI YANG AMAN, TERTIB, BERSATU DAN DAMAI;
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KHUSUSNYA FASILITAS UMUM YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
6. MEWUJUDKAN KOTA BINJAI YANG AMAN, NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN;
7. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA BINJAI YANG BERMORAL, BERETIKA, BERADAB, BERBUDAYA DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
8. MEWUJUDKAN KOTA BINJAI SEHAT.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016, PERLU SAYA SAMPAIKAN HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT :

A. PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2016 DITETAPKAN SEBESAR RP 1.048.464.949.879,42 (SATU TRILYUN EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH KOMA EMPAT PULUH DUA SEN). REALISASI SEBESAR RP 915.399.098.803,00 (SEMBILAN RATUS LIMA BELAS MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA RUPIAH) ATAU MENCAPAI 87,31 %. ADAPUN PENDAPATAN DIMAKSUD BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI



DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2016, SEBESAR RP 98.605.157.050,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN MILYAR ENAM RATUS LIMA JUTA SERATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU LIMA PULUH RUPIAH). TEREALISASI SEBESAR RP 63.136.945.784,00 (ENAM PULUH TIGA MILYAR SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH). ATAU HANYA TEREALISASI SEBESAR 64,03 % DARI TARGET YANG DITETAPKAN. PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERASAL DARI DANA PERIMBANGAN TEREALISASI SEBESAR RP 818.059.491.533,00 (DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS MILYAR LIMA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH) ATAU TERCAPAI SEBESAR 90,83 % DARI TARGET TRANSFER SEBESAR RP 900.621.340.766,00 (SEMBILAN RATUS MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH).

SELANJUTNYA TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH PADA TAHUN ANGGARAN 2016, TEREALISASI SEBESAR RP 34.202.661.486,00 (TIGA PULUH EMPAT MILYAR DUA RATUS DUA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH) ATAU SEBESAR 69,46 % DARI TARGET PADA APBD TAHUN 2016 SEBESAR RP 49.238.452.063,42 (EMPAT PULUH SEMBILAN MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM PULUH TIGA RUPIAH KOMA EMPAT PULUH DUA SEN)

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH



SECARA UMUM KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016 SEBAGAI BERIKUT :

1. BELANJA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DIGUNAKAN UNTUK MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMENUHI KEWAJIBAN DAERAH YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG LAYAK SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
2. BELANJA DAERAH DISUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN PRESTASI KERJA YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN HASIL DARI INPUT YANG DIRENCANAKAN SECARA TERUKUR. HAL TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN SERTA MEMPERJELAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN.
3. DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERHATIAN YANG MAKSIMAL TERHADAP UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH YANG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT LUAS;
4. PENYUSUNAN BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENUNJANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA. PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIRENCANAKAN OLEH SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH HARUS DIIKUTI DENGAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.



5. PADA BELANJA KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BINJAI TAHUN 2016 SERTA KEGIATAN YANG HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

BELANJA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2016 TEREALISASI SEBESAR RP 945.078.606.296,00 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA MILYAR TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH) ATAU SEBESAR 90,21 % DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR RP 1.047.666.717.493,32 (SATU TRILYUN EMPAT PULUH TUJUH MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH KOMA TIGA PULUH DUA SEN).

BELANJA DAERAH KOTA BINJAI PADA TAHUN ANGGARAN 2016 TERSEBUT TERDIRI DARI BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA. ALOKASI BELANJA OPERASI SEBESAR RP 825.948.567.313,32 (DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TUGA RATUS TIGA BELAS RUPIAH KOMA TIGA PULUH DUA SEN). TEREALISASI SEBESAR RP 741.550.724.698,00 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU 89,78 % DARI PAGU ANGGARAN.

BELANJA MODAL DIALOKASIKAN SEBESAR RP 220.618.150.180,00 (DUA RATUS DUA PULUH MILYAR ENAM RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP 202.943.191.598,00 (DUA RATUS DUA MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA



SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU 91,99 % DARI PAGU ANGGARAN. ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR RP 1.100.000.000,00 (SATU MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP 584.690.000,00 (LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) ATAU 53,15 % DARI PAGU ANGGARAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

BERIKUT SAYA SAMPAIKAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2016. CAPAIAN KINERJA PADA LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANTARA LAIN :

1. ANGKA MELEK HURUF (AMH) MENCAPAI 99,77%;
2. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENCAPAI 0,07%;
3. ANGKA PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEBESAR 31,76% UNTUK PENDIDIKAN SMTA;
4. ANGKA PENOLONG KELAHIRAN ANAK LAHIR HIDUP TERAKHIR SEBESAR 59,47 % DIBANTU BIDAN SEDANGKAN PENOLONG KELAHIRAN DIBANTU OLEH DOKTER KANDUNGAN SEBESAR 36,94%.
5. ANGKA BALITA YANG PERNAH DIIMUNISASI SEBASAR 91,41%

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI BERIKUT :

1. PERTUMBUHAN EKONOMI MENCAPAI 5,40%
2. PERTUMBUHAN SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PDRB SEBESAR 12,26%
3. PERTUMBUHAN SEKTOR PENGADAAN AIR MINUM, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG DALAM PDRB SEBESAR 11,18%



4. PDRB PERKAPITA KOTA BINJAI SEBESAR 31,91 JUTA PER KAPITA PER TAHUN.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MELIPUTI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN.

A. URUSAN WAJIB

HASIL YANG DICAPAI DARI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1. URUSAN PENDIDIKAN

MENINGKATKAN MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BERBAGAI JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN, MELALUI :

- PERBAIKAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PENDIDIKAN;
- PERLUASAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN;
- MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR;
- PELAKSANAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL;
- PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENDIDIK PADA BERBAGAI JENJANG PENDIDIKAN;
- PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PARA GURU/TENAGA PENDIDIKAN.



- MELAKUKAN PENINGKATAN DAN PERLUASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI PERSIAPAN UNTUK MEMASUKI JENJANG PENDIDIKAN BERIKUTNYA.
- MENINGKATKAN MINAT DAN BUDAYA BACA MELALUI PENGELOLAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH.

2. URUSAN KESEHATAN

PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEHATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KOTA BINJAI MELALUI :

- MELAKUKAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR KESEHATAN, SEPERTI OBAT-OBATAN, PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN LAINNYA.
- MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGAMANAN TERHADAP MAKANAN DAN BAHAN-BAHAN TERLARANG.
- PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA SETIAP PUSAT PELAYANAN KESEHATAN;
- PROMOSI DAN SOSIALISASI SERTA PENYEBARAN INFORMASI KESEHATAN;
- PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL SERTA BERDEDIKASI DAN BERMORAL;
- PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT DAN PERBAIKAN PERILAKU HIDUP SEHAT MASYARAKAT.
- MENINGKATKAN BERBAGAI UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN BERBAGAI PENYAKIT MENULAR BAIK PENYAKIT MENULAR LANGSUNG MAUPUN PENYAKIT MENULAR YANG BERSUMBER DARI HEWAN/BINATANG.



- MELAKUKAN PEMBINAAN ADVOKASI DAN KONSELING, KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMBANGUNAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KOTA BINJAI MELALUI :

- MELAKUKAN PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
- PENINGKATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
- PEMULIHAN DAN PELESTARIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KOTA BINJAI MELALUI :

- MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN GUNA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS.
- MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR, JARINGAN IRIGASI DAN PENGELOLAAN AIR BAKU.
- MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BENCANA BANJIR

5. URUSAN PENATAAN RUANG

PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KOTA BINJAI MELALUI :



- MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN RUANG WILAYAH YANG MENGARAH PADA PENATAAN POLA RUANG.
- MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI TATA RUANG DALAM KONTEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- MENINGKATKAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN SEPERTI JALAN LINGKUNGAN.

6. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KOTA BINJAI MELALUI:

- MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN BAKAT DAN PRESTASI DIBIDANG OLAHRAGA MELALUI PENGGALIAN POTENSI BERBAGAI CABANG OLAHRAGA SERTA PENINGKATAN PERANAN PEMUDA DAN PELAJAR.
- MENINGKATKAN KETERSEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA YANG DAPAT Mendukung BERKEMBANGNYA PRESTASI OLAHRAGA DAERAH.

7. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMBANGUNAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KOTA BINJAI MELALUI:

- PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM, BAIK DARI ASPEK ORGANISASI, PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN DAYA SAING.



- MENCIPTAKAN IKLIM USAHA KOPERASI DAN UMKM YANG MENGARAH PADA POLA MANAJEMEN USAHA YANG SEHAT DAN MAMPU BERPERAN DALAM KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT.
 - MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KOLOMPOK-KELOMPOK PRODUKTIF YANG MEMPUNYAI AKSES TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DAN UMKM, SEPERTI KELOMPOK USAHA KERAJINAN RAKYAT DAN SECARA KHUSUS KELOMPOK USAHA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DAN PEMUDA.
 - MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK TERUTAMA YANG DIHASILKAN OLEH INDUSTRI
 - MENINGKATKAN KOORDINASI TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN.
8. URUSAN KEPENDUDUKAN
- MELAKUKAN PENATAAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN, TERKAIT PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DATA SERTA PROSES REGISTRASI PENDUDUK.
 - MELAKUKAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BENTUK PERBAIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KEMUDAHAN PELAYANAN TERHADAP BERBAGAI GERAKAN WAJIB (KTP, KARTU KELUARGA, DLL).
9. URUSAN KETENAGAKERJAAN
- MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA YANG BERORIENTASI PADA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA.
 - MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA MELALUI PENERTIBAN DAN



PENGAWASAN SISTEM PENGELOLAAN TENAGA KERJA OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KETENAGAKERJAAN.

- MEMPERBAIKI HAK-HAK TENAGA KERJA, YANG MELIPUTI SISTEM PENGUPAHAN, KEAMANAN KERJA DAN PENYELESAIAN KETENAGAKERJAAN.

10. URUSAN PERHUBUNGAN

- MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN MELALUI PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT.
- MELAKUKAN PEMBINAAN PENGAWASAN TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT DALAM RANGKA MENJAMIN KELANCARAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN ANGKUTAN TERHADAP ORANG DAN BARANG.

11. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN

- MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN HUKUM;
- MELAKUKAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
- MELAKUKAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
- MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH DAN PENGAWASAN SERTA PENGAMANAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH.
- MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN MELALUI PENERAPAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN LEMBAGA PEMERINTAH;



- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA APARATUR DAERAH.
- KERJASAMA DAN KOORDINASI DALAM UPAYA PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS;

12. URUSAN SOSIAL

- MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA, ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN.
- MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

B. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERTANIAN

- MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA MELALUI PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN BAIK LAHAN BASAH MAPUN LAHAN KERING.
- MEREVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN YANG BERORIENTASI PADA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MASYARAKAT PETANI.
- MENINGKATKAN PRODUKSI PETERNAKAN MELALUI PENINGKATAN KESEHATAN HEWAN.

2. URUSAN PARIWISATA

- MELAKUKAN PENGEMBANGAN PEMASARAN POTENSI PARIWISATA MELALUI PROMOSI
- MELAKUKAN PENGAWASAN USAHA PARIWISATA

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,



PENYELENGGARAAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN ADALAH CERMINAN DARI SISTEM DAN PROSEDUR PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN YANG DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNG-JAWABKANNYA KEPADA YANG MEMBERI PENUGASAN.

TUJUAN PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN ADALAH MEMPERLANCAR PELAKSANAAN TUGAS DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN, SERTA MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BAGI DAERAH. BERKAITAN DENGAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2016 TERDAPAT BEBERAPA KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT YANG MEMBERIKAN TUGAS PEMBANTUAN KE KOTA BINJAI, ANTARA LAIN :

- A. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- B. KEMENTERIAN PERTANIAN

ADA JUGA TERDAPAT KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA PUSAT YANG MEMBANTU PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM HAL PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YAITU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DITJEN CIPTA KARYA YANG MEMBERIKAN BANTUAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2016 ANTARA LAIN :

1. PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU
2. PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN
3. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
4. FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA



RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN ASAS EFEKTIVITAS.

DIDALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BINJAI (RPJMD) TAHUN 2011-2015 KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH LEBIH DI FOKUSKAN PADA PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KHUSUSNYA DI KAWASAN METROPOLITAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MEBIDANG DAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI UNTUK MENCIPTAKAN SINERGITAS DAN INTEGRASI WILAYAH, SERTA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM PENGELOLAANNYA.

KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH PADA TAHUN 2016 DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN:

1. DALAM RANGKA PERAYAAN HUT KOPERASI DI KOTA BINJAI TAHUN 2016, DILAKSANAKAN KEGIATAN CERDAS TANGKAS TINGKAT SLTA YANG BERKERJASAMA DENGAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN DEKOPIN PROVINSI SUMATERA UTARA
2. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA SANGAT DIPERLUKAN DALAM RANGKA MENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SEHINGGA PEMERINTAH KOTA BINJAI MEGADAKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI MELALUI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MEMBINA DAN MELATIH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD.



3. PARTISIPASI PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM MENDUKUNG PEKAN RAYA SUMATERA UTARA MERUPAKAN BENTUK KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG SETIAP TAHUN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DALAM RANGKA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DIDASARKAN PADA PASAL 363 AYAT (2), UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA DAERAH DAPAT BEKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK. KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA PADA TAHUN 2016 DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN:

1. DALAM UPAYA MEMBERIKAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN TENTANG JURNALISTIK YANG BERBASIS PADA MEDIA SEKOLAH DI KOTA BINJAI, DIADAKAN KERJASAMA DENGAN TIM PELATIH JURNALISTIK.
2. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI JUGA DIBANGUN BERSAMA DENGAN KANTOR BERITA ANTARA DAN MEDIA NASIONAL/REGIONAL
3. KERJASAMA DAERAH DENGAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL-MEDAN) JUGA DIBANGUN DALAM RANGKA PELELANGAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMKO BINJAI
4. UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM HAL INI KHUSUS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BILAL MAYIT DAN PENGGALI KUBUR DI KOTA BINJAI MAKA



DILAKUKAN KERJASAMA DAERAH DENGAN ANSURANSI BUMIPUTRA

5. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR SANGAT DIPERLUKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN SDM APARATUR KOTA BINJAI SEHINGGA PERLU DIBUKA HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM HAL INI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
6. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA JUGA TETAP DIBANGUN OLEH PEMERINTAH KOTA BINJAI DENGAN PIHAK KONTRAKTOR, KONSULTAN, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, LEMBAGA MASYARAKAT SERTA PIHAK KETIGA LAIN YANG BERKOMPETEN UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN KOTA BINJAI

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA HAKEKATNYA ADALAH PERSYARATAN MUTLAK YANG DIBUTUHKAN UNTUK TERSELENGGARANYA KEGIATAN PEMERINTAH, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN AGAR DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK SESUAI YANG DIHARAPKAN BERSAMA. DEMI MENJAGA KELANGSUNGAN KEGIATAN TERSEBUT, MAKA URUSAN KEGIATAN INI OLEH PEMERINTAH DITETAPKAN MENJADI URUSAN WAJIB.

DALAM PASAL 255 DAN PASAL 256 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DINYATAKAN BAHWA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIBENTUK UNTUK MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.



RAPAT PARIPURNA DPRD YANG SAYA HORMATI,

PADA TAHUN 2015 KOTA BINJAI MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERIMPLIKASI PADA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA DOKUMEN RPJMD 2011 – 2015 MENJADI RPJMD 2016 – 2021 SEHINGGA DALAM DOKUMEN RPJMD, KOTA BINJAI MENGALAMI TRANSISI KEBIJAKAN. SESUAI DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 KOTA BINJAI MASIH MEMPEDOMANI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2011- 2015. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH SELURUH SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI MASIH MENGACU PADA RPJMD TAHUN 2011 – 2015 DAN RPJPD TAHUN 2005-2025. DARI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN MENCIPTAKAN BEBERAPA PERHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIRAIH KOTA BINJAI ANTARA LAIN :

1. BIDANG PEMERINTAHAN

- JUARA II TERBAIK UNTUK ASDEKSI (ASOSIASI SEKRETARIAT DEWAN)TINGKAT NASIONAL
- PIAGAM PEMBINAAN TELADAN KARANG TARUNA KECAMATAN BINJAI BARAT TINGKAT PROVINSI
- JUARA II PENGHARGAAN PAVILIUN TERBAIK (2016) TINGKAT PROVINSI
- JUARA HARAPAN III MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) NASIONAL XXVI TAHUN 2016 TINGKAT NASIONAL
- JUARA TERBAIK III FESTIVAL NASYID TINGKAT DEWASA PUTRI TINGKAT PROVINSI
- JUARA HARAPAN I FESTIVAL NASYID TINGKAT DEWASA PUTRA TINGKAT PROVINSI
- JUARA TERBAIK III BINTANG VOCALIS TINGKAT DEWASA PUTRA PADA KEGIATAN FESTIVAL NASYID TINGKAT PROVINSI



- JUARA HARAPAN II BINTANG VOCALIS TINGKAT REMAJA PUTRI PADA KEGIATAN FESTIVAL NASYID TINGKAT PROVINSI
 - JUARA HARAPAN I BINTANG VOCALIS TINGKAT ANAK-ANAK PADA KEGIATAN FESTIVAL NASYID TINGKAT PROVINSI
 - JUARA I SELEKSI TILAWATIL QURAN (STQ) ANAK-ANAK PUTRA TINGKAT PROVINSI
 - JUARA II SELEKSI TILAWATIL QURAN TAHFIDZ 5 ZUS DAN TILAWAH PUTRI TINGKAT PROVINSI
 - JUARA II SELEKSI TILAWATIL QURAN TAFSIR BAHASA ARAB PUTRA TINGKAT PROVINSI
 - JUARA III SELEKSI TILAWATIL QURAN TAFSIR BAHASA ARAB I DAN TILAWAH PUTRA TINGKAT PROVINSI
 - PIAGAM, KOTA PEDULI HAM TINGKAT NASIONAL
2. BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- JUARA II PENAMPILAN DAN PENYAJIAN MENU TERBAIK DI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) TAHUN 2016
 - MASUK DAFTAR NOMINASI LOMBA PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
3. BIDANG PARIWISATA
- JUARA I PENAMPILAN TERBAIK DAN STAND TERBAIK TINGKAT NASIONAL (YOGYAKARTA)
 - JUARA I DUTA WISATA TINGKAT NASIONAL (KALIMANTAN TENGAH)
4. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
- TERDAPAT BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DIRAIH DALAM BIDANG OLAH RAGA SEPERTI ATLETIK, BULU TANGKIS, TINJU DAN LAIN-LAIN BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN NASIONAL
5. BIDANG KEPENDUDUKAN



- PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENERAPAN KTP-e
TINGKAT NASIONAL OLEH MENTERI DALAM NEGERI
6. BIDANG KESEHATAN
- JUARA I PENAMPILAN KINERJA RS KELAS B PEMERINTAH
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016
7. BIDANG PERHUBUNGAN
- PIALA WAHANA TATA NUGRAHA KATAGORI LALU LINTAS
TINGKAT NASIONAL

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIANLAH GAMBARAN SECARA GARIS BESAR KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2016. PENJELASAN SECARA UTUH MENGENAI KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TERTUANG DALAM DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016. KAMI MENYADARI BAHWA MASIH TERDAPAT BANYAK KEKURANGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN KOTA BINJAI. UNTUK ITU, PANDANGAN DAN EVALUASI DARI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, AKAN KAMI JADIKAN SEBAGAI BAHAN KAJIAN DI MASA MENDATANG.

DEMIKIAN PENYAMPAIAN PIDATO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (L K P J) WALIKOTA BINJAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 INI. TERIMA KASIH DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

WASSALAMUALLAIKUMWARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

WALIKOTA BINJAI



H. M. IDAHAM, SH, M.Si